



**News Title :** Transaksi Berjangka Komoditas Indonesia Capai Rp 22.181 Triliun

**Media Name :** Investor Daily

**Journalist :** va

**Publish Date :** 20 January 2023

**Tonality :** Positive

**News Page :** 9

**News Value :** 60,000,000

**Resources :** Didid Noordiatmoko (Plt. Kepala Bappebti)

**Ads Value :** 20,000,000

**Section/Rubrication :** Industries Trade and Services

**Topic :** Raker Bappebti

## Transaksi Berjangka Komoditas Indonesia Capai Rp 22.181 Triliun

JAKARTA, ID – Badan Pengawas Perdagangan Komoditi (Bappebti) telah melakukan pengawasan terhadap transaksi senilai lebih dari Rp 22 ribu triliun sepanjang 2022. Transaksi tersebut terdiri dari transaksi perdagangan berjangka komoditas sebesar Rp 22.181,75 triliun dan perdagangan aset kripto sebesar Rp 296,66 triliun.

Selain itu, Bappebti melakukan pengawasan terhadap perdagangan fisik emas digital senilai Rp 1.976,88 miliar serta timah murni batangan senilai US\$ 2,36 miliar. Selanjutnya, Bappebti juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem resi gudang (SRG) dan pasar lelang komoditas.

Sepanjang 2022 nilai transaksi SRG tercatat sebesar Rp 1,275 triliun dengan sekitar 20 jenis komoditas dan 165 gudang yang tersebar di 144 kabupaten di 29 provinsi. Terkait pasar lelang, nilai transaksi yang tercatat adalah sebesar Rp 52,5 miliar.

“Besarnya nilai transaksi perdagangan tersebut berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian negara maupun pada penerimaan pajak,” kata Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko di Jakarta, Kamis (19/1/2023).

Bappebti, lanjut Didid, juga turut aktif dalam upaya mewujudkan Indonesia menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF). FATF merupakan suatu keanggotaan negara-negara yang aktif melakukan upaya-upaya pencegahan pencucian uang. Saat ini Indonesia merupakan satu-satunya negara G20 yang belum menjadi anggota FATF.

“Keanggotaan dalam FATF ini penting untuk meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata negara-negara yang akan berinvestasi maupun bertransaksi dengan Indonesia. Bappebti secara aktif mewakili Kementerian Perdagangan bersama PPATK, Kepolisian RI, Kejaksaan, Bank Indonesia dan kementerian lainnya menjawab asesmen yang dilakukan oleh FATF,” terang Didid.

Didid memaparkan, Bappebti merencanakan pembentukan harga acuan komoditas (*price reference*) sesuai dengan mandat UU 32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pada 2023. Ini disebabkan Indonesia belum memiliki harga acuan komoditas tertentu padahal merupakan salah satu negara penghasil terbesar beberapa jenis komoditas. Perdagangan di dalam bursa akan menghasilkan tata kelola perdagangan yang adil dan transparan. Dengan masuk ke dalam bursa, harga yang terbentuk juga tidak ditentukan semata antara pemilik komoditas dan *buyer* di luar negeri.

“CPO dan karet misalnya, Indonesia merupakan penghasil terbesar dunia namun masih mengambil harga acuan yang dihasilkan bursa di luar negeri, seperti Malaysia dan Rotterdam. Untuk dapat menjadi harga acuan, maka komoditas tersebut harus masuk ke dalam bursa. Negara akan diuntungkan dengan harga pasar yang wajar dan dapat memberikan keuntungan semua pihak mulai dari petani, pedagang, pengusaha, bahkan negara dari sisi penerimaan pajaknya,” papar Didid. (va)



**Didid Noordiatmoko**